

## Daftar Kepustakaan

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Afandi, 2008, *Pelaksanaan Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ash-Shabuni dan Muhammad Ali, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Insani Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Helmi Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadimulyo, 1993, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jemmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan*, Visimedia, Jakarta.
- M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oemarsalim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (filsafat,Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Syarial Abbas, 2009, *Mediasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi:Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Awris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Sumatera Barat No.2 Tahun 2007 Tentag Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Sumatera Barat No.9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 13 Tahun 2011 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Pasaman.

#### C. Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Yose Leonando, 2018, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan*, Tesis Magister Universitas Andalas, Padang.

Defto Yuzastra,2010, *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang*, Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang.

Bambang Sugianto, 2017, *Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami*, Jurnal Al'Adl, 9:2.

Layyin Mahfiana, 2013, *Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo*, Volume 7 No. 1 Tahun 2013.

D. Internet :

<http://m.kumparan.com>

[id.m.termwiki.com/ID/equality\\_theory](http://id.m.termwiki.com/ID/equality_theory)

<http://academia.edu.com>

<http://hukum.online.com>

